



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

KARYA AKHIR

EVALUASI PROSES INVENTARISASI  
BARANG MILIK DAERAH DI DALAM MENDUKUNG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DIAJUKAN OLEH :

WASIS SUPRIYADI  
0606144672

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR  
MAGISTER AKUNTANSI  
2008



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

---

TANDA PERSETUJUAN KARYA AKHIR

Nama : Wasis Supriyadi  
Nomor Mahasiswa : 0606144672  
Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan  
Judul Karya Akhir : Evaluasi Proses Inventarisasi Barang Milik Daerah di dalam Mendukung Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Efisien di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Tanggal : ..... Ketua Program  
Magister Akuntansi : Dr. Lindawati Gani

Tanggal : ..... Pembimbing Karya Akhir : Dwi Setiawan, SE, M.Si., Ak.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait satu dengan yang lain. Kegiatan yang merupakan salah satu alat (*tools*) untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pengelolaan adalah kegiatan inventarisasi barang milik daerah. Buku Inventaris barang milik daerah berdasarkan data yang benar, lengkap, dan akurat merupakan sarana informasi yang tepat bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi gambaran tentang proses inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pertanyaan penelitian adalah apakah proses inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hasil inventarisasi dapat mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah berupa pemecahan masalah terhadap kekurangan atau kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah. Metodologi penelitian yang dipakai adalah studi literatur dan studi lapangan.

Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur penting di dalam pengelolaan barang milik daerah belum begitu diperhatikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi

kuantitas adalah tidak adanya petugas khusus Pemegang/Penyimpan Barang pada masing-masing unit/satuan kerja. Dari segi kualitas adalah kurangnya program atau kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, atau bimbingan teknis bagi para pengelola barang.

Kegiatan inventarisasi barang milik daerah merupakan suatu siklus per lima tahunan. Inventarisasi pada tahun pertama dimulai dengan kegiatan sensus barang. Sensus barang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat (*up to date*). Sensus menghasilkan Buku Inventaris dan Rekapitulasinya. Inventarisasi pada tahun kedua hingga tahun kelima dilakukan melalui kegiatan mutasi barang. Untuk tahun keenam dilakukan sensus kembali. Mutasi barang menghasilkan Daftar Mutasi Barang dan Rekapitulasinya. Rekapitulasi Buku Inventaris dan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang merupakan dasar pembuatan Neraca Daerah.

Proses kerja inventarisasi barang milik daerah yang terdiri dari kegiatan pendataan fisik dan legalitas, kodifikasi, pengelompokan, dan pencatatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Walau telah dilaksanakan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan. Di dalam pendataan fisik terdapat beberapa unit barang seperti bidang tanah, alat-alat kedokteran, dan alat-alat kesenian yang tidak diberi nilai (diberi nilai nol). Di dalam pendataan legalitas adalah belum dimilikinya bukti kepemilikan memadai pada beberapa bidang tanah, alat-alat angkutan, dan bangunan gedung..

Kodifikasi barang milik daerah belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Nomor kode lokasi/komponen kepemilikan barang belum dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung dikarenakan belum adanya kode unit bidang dan kode sub unit/satuan kerja yang harus dibakukan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat. Pengelompokan/penggolongan barang milik daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Barang milik daerah digolongkan ke dalam 19 (sembilan belas)

bidang barang yang diklasifikasikan lagi sesuai penggolongan barang yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih menggunakan sistem manual artinya pencatatan hanya dengan mengisi formulir yang telah disediakan baik dilakukan dengan tulis tangan, mesin ketik ataupun komputer. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum menerapkan sistem aplikasi dalam hal pencatatan barang milik daerah, yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada).

Rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Walau telah dilaksanakan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan. Terdapat kekurangan di dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran yaitu belum dimilikinya standarisasi sarana dan prasarana yang harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat. Penghapusan terhadap barang milik daerah yang kondisinya rusak berat belum dilaksanakan. Barang milik daerah dengan kondisi rusak berat masih tercantum dalam daftar barang inventaris dan neraca daerah. Hal ini akan mengurangi kualitas dari neraca daerah. Kekurangan di dalam pengamanan barang milik daerah terutama pengamanan fisik dan hukum.

Inventarisasi barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki peran yang penting di dalam rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Kekurangan yang terdapat di dalam pelaksanaan inventarisasi dan kegiatan pengelolaan barang milik daerah lainnya mengakibatkan proses inventarisasi barang milik daerah kurang optimal di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hendaknya segera memperbaiki atau menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah dan juga kegiatan pengelolaan

barang milik daerah lainnya. Apabila kekurangan yang ada telah diperbaiki, maka inventarisasi barang milik daerah akan dapat memiliki peran penting di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien. Aspek legalitas barang milik daerah harus segera diselesaikan. Peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Manusia pelaksana inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah perlu diupayakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, atau bimbingan teknis. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebaiknya juga menerapkan aplikasi inventarisasi barang milik daerah di dalam pencatatan barang milik daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Hal ini dilakukan untuk mempercepat perolehan informasi mengenai inventarisasi barang milik daerah dan untuk mendapatkan data barang milik daerah yang benar dan lebih akurat (*up to date*).

Keterbatasan penelitian adalah data penelitian adalah data ketika pelaksanaan Kepmendagri 152 tahun 2004 masih berlaku, sehingga analisis dan pembahasan yang dilakukan adalah dengan mengacu pada Kepmendagri tersebut. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah setelah Permendagri 17 tahun 2007 diterapkan. Diperlukan juga penelitian lebih lanjut tentang rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah lainnya, sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang maksimal mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Karya Akhir ini  
kupersembahkan kepada  
istri dan buah hatiku tercinta



*Eka Murnikasari Supriyadi*  
*Lutfi Ahmad Sani Supriyadi*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *robbil 'alamin* puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wata'ala* Tuhan Pencipta Alam. Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Akhir ini dengan tepat waktu. Sholawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad *salallahu 'alaihi wassalam*. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis di dalam menyelesaikan karya akhir dan studi ini :

1. Ibu Dr. Lindawati Gani selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
2. Bapak Dwi Setiawan, SE, M.Si, Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.
3. Bapak Dr. Roni Kusuma Muntoro dan Bapak Amdi Very Darma, M.Acc. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritiknya.
4. Bapak Deddi Nordiawan, M.Si, Dr. Bambang Pamungkas, Dr. Hekinus Manao, Syafri Adnan Baharudin, MBA, Dr. Muslikh, Gatot Supiartono, M. Acc., Siswo Sujanto, DEA, Irmansyah, Tedy Fardiansyah, Rifki Ismal, Andry Asmoro, Yohanes, Danny Sirait, Joni Setiawan, seluruh guru besar, dosen pengajar, dan staf akademik pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.



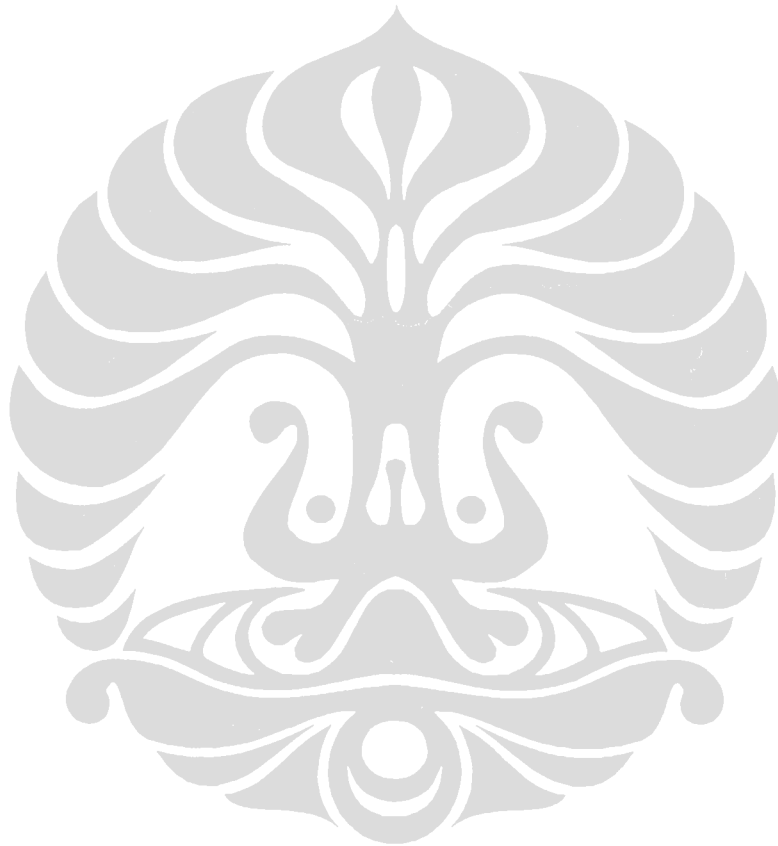
5. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan serta bantuan moril dan materiil kepada penulis untuk mengikuti studi.
6. Pak Irfan Leonardo Abdullah di Dinas PPKAD dan Pak Hardiman di Bagian Perlengkapan Setdakab Lampung Barat yang telah membantu dalam perolehan data penelitian.
7. Istriku tercinta Eka Murnikasari Supriyadi dan buah hatiku tercinta Lutfi Ahmad Sani Supriyadi yang selalu memberi dukungan dan telah berkorban kehilangan waktu selama penulis mengikuti studi.
8. Segenap keluarga Bapak Sukarto, Ibu Mujirah, Bapak Murbo Prianto, Ibu Suarsih, Mbak Suswiyanti, Arif Munardi, Dwi, Anggun, dan Kharen yang senantiasa memberi dukungan dan doa.
9. My friends Muharyo Indro Yulianto, Agus Setiadi, Dharmasta, Setyo Bimandoko, Asep Suryamiharja, Agus Mardianto, Joko Setio Sudjatmoko, Fitri Supriati, Nina Hartinjung, Winner Jihad Akbar, Hamidi, Nina Purnamasari, Dyah Parwita Desi, dan kawan-kawan seperjuangan angkatan pertama pada Program Studi Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

*“Tidak ada gading yang tidak retak”*. Penulis memiliki keterbatasan di dalam melakukan penulisan sehingga saran dan kritik dari semua pihak demi pengembangan ilmu pengetahuan menjadi hal yang sangat penulis harapkan. Penulis berdoa semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penyelesaian karya akhir dan studi ini akan menjadi amal

shaleh dan mendapat balasan pahala yang besar dari Allah *subhanahu wata'ala. Amin ya robbal 'alamin!*

Jakarta, 1 Agustus 2008

**Wasis Supriyadi**



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
TANDA PERSETUJUAN KARYA AKHIR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	5
1.3 Ruang Lingkup .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Metodologi Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Barang Milik Daerah .....	8
2.2 Wewenang, Tugas, dan Fungsi Pengelola Barang Milik Daerah .....	12
2.3 Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah .....	17

2.3.1 Sensus Barang Milik Daerah .....	20
2.3.2 Mutasi Barang Milik Daerah .....	29
2.4 Proses Kerja Inventarisasi Barang Milik Daerah .....	30
2.4.1 Pendataan Fisik dan Legalitas Barang Milik Daerah .....	35
2.4.2 Kodefikasi Barang Milik Daerah .....	36
2.4.3 Pengelompokan/Penggolongan Barang Milik Daerah .....	43
2.4.4 Pencatatan Barang Milik Daerah .....	51
2.5 Peranan Inventarisasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	52
2.5.1 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran .....	53
2.5.2 Pengadaan .....	54
2.5.3 Pemeriksaan, Penerimaan dan Pengeluaran .....	55
2.5.4 Pemanfaatan .....	56
2.5.5 Perubahan Status Hukum/Pemindahtanganan .....	57
2.5.6 Pengamanan .....	58
2.5.7 Penilaian .....	59
2.5.8 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian .....	59
2.5.9 Pembiayaan .....	60
2.5.10 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi .....	60

**BAB III GAMBARAN INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN  
BARANG MILIK DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT**

3.1 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat .....	61
3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat .....	64
3.3 Organisasi Pengelola Barang Milik Daerah .....	67

3.4 Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah .....	76
3.4.1 Inventarisasi Awal .....	76
3.4.2 Sensus Barang Daerah .....	78
3.4.3 Mutasi Barang Daerah .....	84
3.5 Proses Kerja Inventarisasi Barang Milik Daerah .....	87
3.5.1 Pendataan Fisik dan Legalitas Barang Milik Daerah .....	87
3.5.2 Kodefikasi Barang Milik Daerah .....	91
3.5.3 Pengelompokan/Penggolongan Barang Milik Daerah .....	94
3.5.4 Pencatatan Barang Milik Daerah .....	96
3.6 Peranan Inventarisasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	97
3.6.1 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran .....	97
3.6.2 Pengadaan .....	98
3.6.3 Pemeriksaan, Penerimaan dan Pengeluaran .....	100
3.6.4 Pemanfaatan .....	102
3.6.5 Perubahan Status Hukum/Pemindahtanganan .....	105
3.6.6 Pengamanan .....	106
3.6.7 Penilaian .....	107

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Organisasi Pengelola Barang Milik Daerah .....	108
4.2 Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah .....	111
4.2.1 Sensus Barang Daerah .....	118
4.2.2 Mutasi Barang Daerah .....	123
4.3 Proses Kerja Inventarisasi Barang Milik Daerah .....	123

4.3.1	Pendataan Fisik dan Legalitas Barang Milik Daerah .....	123
4.3.2	Kodefikasi Barang Milik Daerah .....	127
4.3.3	Pengelompokan/Penggolongan Barang Milik Daerah .....	134
4.3.4	Pencatatan Barang Milik Daerah .....	136
4.4	Peranan Inventarisasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	137
4.4.1	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran .....	139
4.4.2	Pengadaan .....	140
4.4.3	Pemeriksaan, Penerimaan dan Pengeluaran .....	141
4.4.4	Pemanfaatan .....	141
4.4.5	Perubahan Status Hukum/Pemindahtanganan .....	143
4.4.6	Pengamanan .....	144
4.4.7	Penilaian .....	145
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan .....	147
5.2	Saran .....	151
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	153
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007 .....	66
Tabel 3.2	Rekapitulasi Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2002 .....	76
Tabel 3.3	Rekapitulasi Barang Milik Daerah Hasil Sensus Barang Tahun 2005 .....	83
Tabel 3.4	Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2006 .....	86
Tabel 3.5	Rekapitulasi Barang Daerah dengan Kondisi Rusak Berat .....	89
Tabel 3.6	Daftar Bidang Barang Daerah yang Diberi Nomor Register Hasil Sensus Barang Daerah Tahun 2005 .....	93
Tabel 3.7	Penggolongan Barang Milik Daerah Hasil Sensus Barang Daerah 2005 yang telah Dikonversi ke dalam Standar Akuntansi Pemerintahan .....	94
Tabel 4.1	Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat .....	108
Tabel 4.2	Pembakuan Nomor Kode Unit Bidang /Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat .....	129
Tabel 4.3	Pembakuan Nomor Kode Sub Unit Bidang /Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat .....	131
Tabel 4.4	Daftar Tanah Kosong yang Belum Digunakan Sesuai dengan Peruntukannya ...	142

## DAFTAR GAMBAR

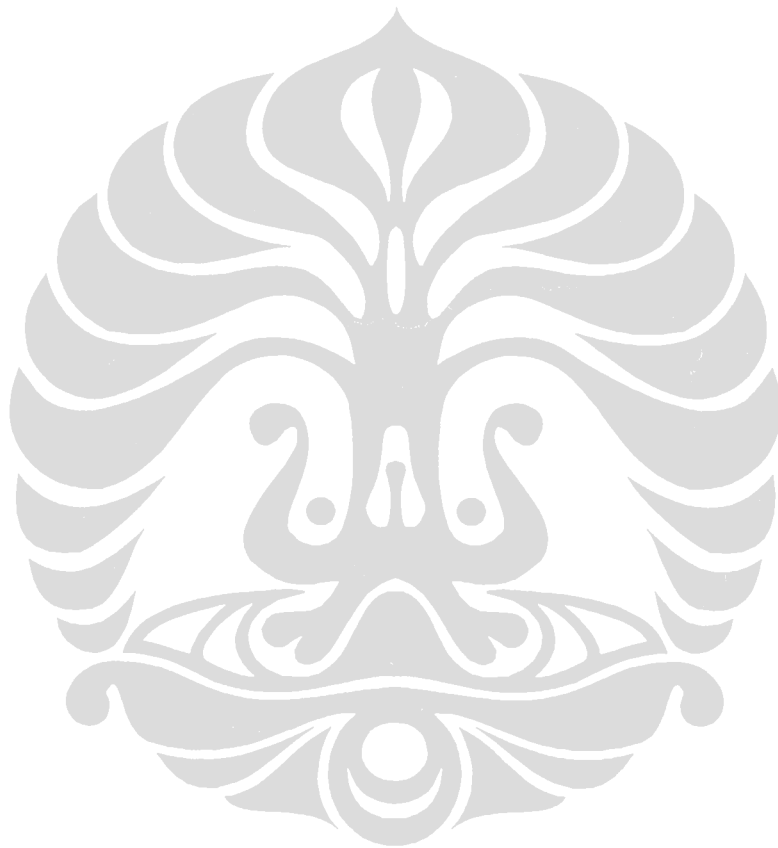
Gambar 2.1 Alur Manajemen Aset .....	30
Gambar 2.2 Proses Kerja Inventarisasi Aset .....	34
Gambar 2.3 Nomor Kode Lokasi/Kepemilikan Barang .....	37
Gambar 2.4 Nomor Kode Barang Menurut Kepmendagri 152 tahun 2004 .....	40
Gambar 2.5 Nomor Kode Barang Menurut Permendagri 17 tahun 2007 .....	42
Gambar 3.1 Peta Propinsi Lampung (Inset : Kabupaten Lampung Barat) .....	62
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat .....	66
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat .....	70
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat .....	72
Gambar 4.1 Pengelola Barang Daerah Menurut Kepmendagri 152 tahun 2004 .....	109
Gambar 4.2 Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Permendagri 17 Tahun 2007 .....	111
Gambar 4.3 Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah .....	112
Gambar 4.4 Siklus Inventarisasi Barang Milik Daerah per Lima Tahunan .....	114
Gambar 4.5 Alur Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah .....	115
Gambar 4.6 Alur Inventarisasi Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat .....	118
Gambar 4.7 Alur Kerja Sensus Barang Milik Daerah .....	120
Gambar 4.8 Nomor Kode Lokasi/Kepemilikan Barang .....	128



Gambar 4.9 Penggolongan Barang Daerah yang Dikonversi ke dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan ..... 135

Gambar 4.10 Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah ..... 138



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekapitulasi Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2003 dan 2004
- Lampiran 2 Ringkasan Eksekutif Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Tahun 2005 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Lampung
- Lampiran 3 Usulan Standar Operasional Prosedur (Panduan) Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di dalam Mendukung Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Penelitian
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian dari Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat